PERUBAHAN
RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan penyusunan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilandasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang berdasarkan prestasi kerja.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi ke depan yang akan dicapai, upaya yang harus dilakukan dan kegiatan sebagai tindakan nyata pencapaian tujuan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda. Hal ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi setiap *stakeholder* dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam memenuhi hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun.

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2025-2029, sehingga sasaran utama penyusunan Renja ini sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Disamping itu juga mengacu pada Permendagri Nomor 13 tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur urusan wajib dan urusan pilihan instansi Pemerintah lingkup Departemen Dalam Negeri dan

Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan RPJMD Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunannya dilakukan melalui tahapan perubahan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk perencanaan yang realistis dan dapat dilaksanakan, yang disertai dengan masukan dari berbagai pihak.

Namun demikian kami menyadari dalam penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami berharap bantuan semua pihak untuk memberikan data dan informasi yang lebih tepat dan akurat untuk penyusunan rencana selanjutnya.

Akhirulkalam, bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta untuk lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. di Kota Samarinda serta demi terwujudnya Kota Samarinda yang sejahtera melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu kerjasama dari semua pihak.

Semoga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini berguna bagi pembangunan di Kota Samarinda pada umumnya dan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada khususnya.

Samarinda,2 September 2025
Kepala Dinas,

Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
NIP.196707131991031013

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DP2PA Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II..... 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP2PA.……25

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 38

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 39

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 49

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DP2PA

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DP2PA ……. 50

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DP2PA …… 54

3.3 Program dan Kegiatan ……. 54

BAB IV PENUTUP …….. 82

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Triwulan II 12

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan DP2PA Kota Samarinda 33

Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....40

Tabel 3.1 Diagram IPG Provinsi Kaltim 2015-2019.....52

Tabel 3.2 Diagram IDG Provinsi Kaltim 2015-2019 53

Tabel 3.3 Perubahan Renja DP2PA Kota Samarinda …….. 62

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 73

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota Samarinda dalam menyelenggarakan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025 yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan RPJMD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Bersama Tiga Menteri : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
27. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
28. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak;
29. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Tracffiking perempuan dan anak);
30. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
31. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);
32. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
34. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

35. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
36. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
39. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
40. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
41. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
42. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, dan perencanaan program / kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025. Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja adalah untuk memasukkan program dan kegiatan yang merupakan prioritas Perangkat Daerah dan hasil dari Musrenbang yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA TAHUN BERKENAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Triwulan II

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2025 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2025 Triwulan II, belum memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Tidak tercapainya target maksimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya penghematan dan efisiensi dana kegiatan;
2. Terdapat beberapa program/kegiatan yang masih belum dapat dilaksanakan padahal sudah diproyeksikan akan tercapai pada pelaksanaan program pembangunan tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda diprediksi permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran Pokja Pengarusutamaan Gender dan Pelaksanaan PPRG;

2. Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Masih rendahnya peran ibu dalam pendidikan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu :

1. Masih dimungkinkan tinggi kasus kekerasan perempuan dan anak;
2. Masih dimungkinkan penurunan perkawinan usia anak;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak;
4. Meningkatnya layanan pencegahan, penanganan dan rujukan dalam kasus kekerasan perempuan dan anak;
5. Meningkatnya peran serta Perangkat Daerah dalam melaksanakan Implementasi PUG melalui PPRG dan digunakan dalam mengambil kebijakan;
6. Masih dimungkinkan naiknya peringkat Kota Layak Anak (KLA) dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

1. Melakukan advokasi untuk menambah anggaran pemenuhan sarana prasarana yang mendukung Kota Layak Anak;
2. Melaksanakan inovasi percepatan implementasi PUG yaitu GESIT (*Gender Budget Analysis With Simple Think*);

3. Membuat regulasi berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Instruksi Walikota dan Surat Edaran Walikota yang mengatur tentang pelaporan, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak Kota Samarinda dengan sasaran tempat kerja, rumah tangga dan fasilitas umum;
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia di Dinas, UPTD PPA dan Puspaga agar dapat melaksanakan pelayanan yang standar, profesional dan komprehensif dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
5. Melaksanakan peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum agar dapat berdepan aktif dalam pembangunan;
6. Melakukan kerjasama dan memperluas jejaring dengan OPD, instansi vertikal, Organisasi masyarakat, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam rangka mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan orkestrasi dalam mengintegrasikan kegiatan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan OPD, instansi vertikal, Organisasi masyarakat, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa untuk mewujudkan Samarinda Menuju Kota Layak Anak, Samarinda Ramah Perempuan dan Ramah Anak, serta Samarinda Sebagai Pusat Kota Peradaban.

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Triwulan II

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda												
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			12,623,163,408			1,830,165,911		3,602,965,748		3,602,965,748	38.78	28.54
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			307,608,833			12,035,000		52,294,860		52,294,860	21.21	17
2	8	2				Capaian Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Sumbangan Pendapatan Perempuan	68,69 Persentase			17		32				46.59	
2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			182,919,833			8,195,000		35,791,360		35,791,360	38.63	19.57
2	8	2	2.01			Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG	3 Dokumen			1		1				33.33	
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			97,239,833	PAD		4,195,000		17,391,360		17,391,360	33.33	17.89
2	8	2	2.01	2		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1		1				33.33	
2	8	2	2.01	6	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota			42,540,000	PAD		0		14,400,000		14,400,000	40	33.85
2	8	2	2.01	6		Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	200 Orang			40		80				40	
2	8	2	2.01	8	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota			43,140,000	PAD		4,000,000		4,000,000		4,000,000	42.55	9.27
2	8	2	2.01	8		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	235 Orang			100		100				42.55	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**38.63**	**19.57**
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			42,607,000			0		5,534,500		5,534,500	0	12.99
2	8	2	2.02			Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	250 orang			0		50				20	
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			42,607,000	PAD		0		5,534,500		5,534,500	0	12.99
2	8	2	2.02	2		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Organisasi			0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**0**	**12.99**
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			82,082,000			3,840,000		10,969,000		10,969,000	25	13.36
2	8	2	2.03			Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan	2 Layanan			0		0				0	
2	8	2	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			42,275,000	PAD		0		5,519,000		5,519,000	0	13.05
2	8	2	2.03	1		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	4 Lembaga			0		0				0	
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			39,807,000	PAD		3,840,000		5,450,000		5,450,000	50	13.69
2	8	2	2.03	2		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang			25		25				50	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**25**	**13.36**
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																**21.21**	**17**

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			1,069,461,000			97,317,652		194,536,152		194,536,152	24.63	18.19
2	8	3				persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0.034 Persen			0.0134		0.0214				62.94	
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			223,368,000			19,203,550		36,203,050		36,203,050	25	16.21
2	8	3	2.01			Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	110 Kasus			40		65				59.09	
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			177,226,000	PAD		18,099,850		35,099,350		35,099,350	50	19.8
2	8	3	2.01	1		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1		2				50	
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			46,142,000	PAD		1,103,700		1,103,700		1,103,700	0	2.39
2	8	3	2.01	2		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah			0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**25**	**16.21**
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			297,843,000			38,140,202		61,359,202		61,359,202	24.88	20.6
2	8	3	2.03			Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	2 Lembaga			1		1				50	
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			48,781,000	PAD		554		554		554	60	1.14
2	8	3	2.03	2		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 Orang			90		90				60	
2	8	3	2.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			25,000,000	PAD		0		23,219,000		23,219,000	6.2	92.88
2	8	3	2.03	3		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	500 Orang			0		31				6.2	

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			24,062,000	PAD		490		490		490	0	2.04
2	8	3	2.03	4		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			0		0				0	
2	8	3	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak			200,000,000	PAD		37,096,202		37,096,202		37,096,202	33.33	18.55
2	8	3	2.03	1		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1		1				33.33	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**24.88**	**20.6**
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			548,250,000			39,973,900		96,973,900		96,973,900	24	17.69
2	8	3	2.02			Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan	0.034 Persen			0.0134		0.0214				62.94	
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak			548,250,000	PAD		39,973,900		96,973,900		96,973,900	24	17.69
2	8	3	2.02	1		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	200 Orang			23		48				24	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**24**	**17.69**
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 3)																**24.63**	**18.19**
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			189,840,000			28,807,250		63,943,500		63,943,500	92.5	33.68
2	8	4				persentase perkawinan anak	1.85 persen			0.59		0.86				46.49	
2	8	4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			89,840,000			15,391,750		30,404,750		30,404,750	85	33.84
2	8	4	2.02			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi	8 Lembaga			1		2				25	
2	8	4	2.02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			42,072,000	PAD		0		4,813,000		4,813,000	80	11.44
2	8	4	2.02	1		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga			4		4				80	
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			47,768,000	PAD		15,391,750		25,591,750		25,591,750	90	53.58
2	8	4	2.02	2		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang			15		135				90	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**85**	**33.84**
Predikat Kinerja																**T**	**SR**
2	8	4	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100,000,000			13,415,500		33,538,750		33,538,750	100	33.54
2	8	4	2.03			Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	300 Keluarga			111		236				78.67	
2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100,000,000	PAD		13,415,500		33,538,750		33,538,750	100	33.54
2	8	4	2.03	1		Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Layanan			0		5				100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**100**	**33.54**
Predikat Kinerja																**ST**	**SR**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 4)																**92.5**	**33.68**
Predikat Kinerja																**ST**	**SR**

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			47,546,000			7,105,380		9,829,380		9,829,380	0	20.67
2	8	5				Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	4 Dokumen			0		0				0	
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			47,546,000			7,105,380		9,829,380		9,829,380	0	20.67
2	8	5	2.01			Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	4 Dokumen			0		0				0	
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			47,546,000	PAD		7,105,380		9,829,380		9,829,380	0	20.67
2	8	5	2.01	1		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen			0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**0**	**20.67**
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 5)																**0**	**20.67**
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			306,354,000			72,932,460		152,725,740		152,725,740	20.17	49.85
2	8	6				Kota Layak Anak	800 s/d 900 point			0		0				0	
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			142,849,000			66,340,460		103,598,740		103,598,740	25	72.52
2	8	6	2.01			Dokumen Kota Layak Anak	7 Dokumen			0		0				0	
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			47,835,000	PAD		4,880,980		16,958,980		16,958,980	50	35.45
2	8	6	2.01	1		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	40 Organisasi			0		20				50	
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			95,014,000	PAD		61,459,480		86,639,760		86,639,760	0	91.19
2	8	6	2.01	2		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen			0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**25**	**72.52**
Predikat Kinerja																**SR**	**S**

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			163,505,000			6,592,000		49,127,000		49,127,000	15.33	30.05
2	8	6	2.02			Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	20 Lembaga			0		10				50	
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			47,835,000	PAD		0		13,605,000		13,605,000	61.33	28.44
2	8	6	2.02	1		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang			0		92				61.33	
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20,000,000	PAD		0		2,200,000		2,200,000	0	11
2	8	6	2.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			0		0				0	
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			47,835,000	PAD		1,290,000		20,223,000		20,223,000	0	42.28
2	8	6	2.02	3		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			0		0				0	
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			47,835,000	PAD		5,302,000		13,099,000		13,099,000	0	27.38
2	8	6	2.02	4		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			0		0				0	

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)																**15.33**	**30.05**
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 6)																**20.17**	**49.85**
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			2,476,864,000			92,405,600		138,593,600		138,593,600	55	5.6
2	8	7				persentase kasus kekerasan terhadap anak	1.60 Persen			0.0233		0.0323				2.02	
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			26,977,000			16,040,000		19,165,000		19,165,000	75	71.04
2	8	7	2.01			Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota	120 Kasus			62		87				72.5	
2	8	7	2.01	3	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA			26,977,000	PAD		16,040,000		19,165,000		19,165,000	75	71.04
2	8	7	2.01	3		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	4 Kegiatan			1		3				75	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**75**	**71.04**
Predikat Kinerja																**S**	**S**
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			105,357,000			0		4,837,000		4,837,000	0	4.59
2	8	7	2.03			Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 Lembaga			0		0				0	
2	8	7	2.03	6	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/			105,357,000	PAD		0		4,837,000		4,837,000	0	4.59
2	8	7	2.03	6		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	220 Orang			0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**0**	**4.59**
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2,344,530,000			76,365,600		114,591,600		114,591,600	90	4.89
2	8	7	2.02			Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan	1.60 Persen			0.0233		0.0323				2.02	
2	8	7	2.02	5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak			505,488,000	PAD		76,365,600		114,591,600		114,591,600	120	22.67
2	8	7	2.02	5		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	85 Orang			60		102				120	
2	8	7	2.02	7	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak			1,839,042,000	PAD		0		0		0	60	0
2	8	7	2.02	7		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	170 Layanan			60		102				60	

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)																**90**	**4.89**
Predikat Kinerja																**T**	**SR**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 7)																**55**	**5.6**
Predikat Kinerja																**R**	**SR**
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,225,489,575			1,519,562,569		2,991,042,516		2,991,042,516	57.93	36.36
2	8	1				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai			71.43		71.43				78.93	
2	8	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			280,093,000			39,493,800		57,268,800		57,268,800	45.83	20.45
2	8	1	2.01			Nilai AKIP	74 Nilai			76		76				102.7	
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			139,828,000	PAD		14,888,800		14,888,800		14,888,800	83.33	10.65
2	8	1	2.01	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			2		5				83.33	
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			47,815,000	PAD		7,440,000		16,540,000		16,540,000	50	34.59
2	8	1	2.01	6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			1		2				50	
2	8	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50,000,000	PAD		17,165,000		25,390,000		25,390,000	50	50.78
2	8	1	2.01	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1		2				50	
2	8	1	2.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			42,450,000	PAD		0		450		450	0	1.06
2	8	1	2.01	10		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**45.83**	**20.45**
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,332,323,410			1,232,353,813		2,608,592,792		2,608,592,792	63.33	41.19
2	8	1	2.02			Jumlah Laporan	12 Laporan			3		6				50	
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5,842,374,746	PAD		1,176,253,813		2,465,672,792		2,465,672,792	100	42.2
2	8	1	2.02	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan			36		36				100	
2	8	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			439,948,664	PAD		56,100,000		135,400,000		135,400,000	50	30.78
2	8	1	2.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen			1		2				50	
2	8	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			50,000,000	PAD		0		7,520,000		7,520,000	40	15.04
2	8	1	2.02	5		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			1		2				40	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**63.33**	**41.19**
Predikat Kinerja																**R**	**SR**
2	8	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,000,000			49,500,000		49,500,000		49,500,000	100	49.5
2	8	1	2.05			Jumlah pegawai	44 Orang			11		55				125	
2	8	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			100,000,000	PAD		49,500,000		49,500,000		49,500,000	100	49.5
2	8	1	2.05	11		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang			8		8				100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**100**	**49.5**
Predikat Kinerja																**ST**	**SR**
2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			231,186,000			17,363,722		50,646,902		50,646,902	42.5	21.91
2	8	1	2.06			Jumlah Laporan	4 Laporan			2		3				75	
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6,000,000	PAD		0		6,000,000		6,000,000	100	100
2	8	1	2.06	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			0		3				100	
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15,609,000	PAD		0		0		0	0	0
2	8	1	2.06	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			0		0				0	
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10,000,000	PAD		1,920,000		4,320,000		4,320,000	60	43.2
2	8	1	2.06	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			1		3				60	
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			21,218,000	PAD		0		9,970,000		9,970,000	25	46.99
2	8	1	2.06	5		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			0		1				25	
2	8	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			15,000,000	PAD		0		4,440,000		4,440,000	50	29.6
2	8	1	2.06	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan			0		1				50	
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			163,359,000			15,443,722		25,916,902		25,916,902	20	15.86
2	8	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan					2				20	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**42.5**	**21.91**
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	8	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			581,887,165			46,900,000		46,900,000		46,900,000	25	8.06
2	8	1	2.07			laporan rencana kebutuhan barang	1 Laporan			1		1				100	
2	8	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			300,000,000	PAD		0		0		0	0	0
2	8	1	2.07	1		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			0		0				0	
2	8	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			221,887,165	PAD		0		0		0	0	0
2	8	1	2.07	2		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			0		0				0	
2	8	1	2.07	5	Pengadaan Mebel			50,000,000	PAD		46,900,000		46,900,000		46,900,000	100	93.8
2	8	1	2.07	5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit			4		4				100	
2	8	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10,000,000	PAD		0		0		0	0	0
2	8	1	2.07	6		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**25**	**8.06**
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			315,000,000			61,504,175		105,686,963		105,686,963	62.5	33.55
2	8	1	2.08			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			1		2				100	
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			165,000,000	PAD		32,312,175		48,802,963		48,802,963	66.67	29.58
2	8	1	2.08	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			1		2				66.67	
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			150,000,000	PAD		29,192,000		56,884,000		56,884,000	58.33	37.92
2	8	1	2.08	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			4		7				58.33	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**62.5**	**33.55**
Predikat Kinerja																**R**	**SR**
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			385,000,000			72,447,059		72,447,059		72,447,059	66.35	18.82
2	8	1	2.09			Jumlah Laporan Pemeliharaan	4 Laporan			1		2				50	
2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100,000,000	PAD		44,815,238		44,815,238		44,815,238	53.85	44.82
2	8	1	2.09	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit			4		7				53.85	
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			25,000,000	PAD		7,260,821		7,260,821		7,260,821	50	29.04
2	8	1	2.09	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			1		1				50	

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10,000,000	PAD		5,000,000		5,000,000		5,000,000	61.54	50
2	8	1	2.09	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit			5		8				61.54	
2	8	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			250,000,000	PAD		15,371,000		15,371,000		15,371,000	100	6.15
2	8	1	2.09	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1		1				100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																**66.35**	**18.82**
Predikat Kinerja																**S**	**SR**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)																**57.93**	**36.36**
Predikat Kinerja																**R**	**SR**
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									1,772,799,837		0	0		3,602,965,748			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																**38.78**	**28.54**
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																**SR**	**SR**
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian :																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																	
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya :																	
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya :																	
	2.08.2.13.0.00.04.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda			12,623,163,408			1,830,165,911					38.78	28.54		

Penjelasan anggaran dan realisasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 :

1. Untuk Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025 sebesar Rp. 12.456.472.162 terdiri dari 7 program dan 22 kegiatan 51 sub kegiatan.
2. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Samarinda Tahun 2025 mengacu pada Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan Pelayanan tahun–tahun sebelumnya. sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi Pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya.

Dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan Renstra telah menghasikan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pelayanan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum di daya gunakan secara optimal. Kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Sasaran program kegiatan tahun 2025 telah terlaksana dengan baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya. Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan indikator kinerja yang sudah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 masing-masing bidang melaksanakan kegiatan, yaitu dengan melaksanakan 7 program, 22 kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada

Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
2. Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pengembangan Lembaga

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan pencegahan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota
2. Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan

Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota

1. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota
4. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota

1. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan bahan logistik kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Fasilitasi kunjungan tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (UPTD)

Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota

1. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK.

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Permen PPA No.3 Tahun 2023	Presentase ARG pada belanja langsung APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	
2	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Permen PPA No.3 Tahun 2023	Presentase ARG pada belanja langsung APBD	20 PD	40 PD	50 PD	60 PD	20 PD		50 PD	60 PD	
3	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota	Permen PPA No.3 Tahun 2023		20 PD	40 PD	50 PD	60 PD	20 PD		50 PD	60 PD	
4	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Permen PPA No.3 Tahun 2023		10 organisasi	10 organisasi	30 organisasi	40 organisasi	10 organisasi		30 organisasi	40 organisasi	
5	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				2 lembaga	3 lembaga	1 lembaga			3 lembaga	1 lembaga	
6	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				20 orang	30 orang	10 orang			30 orang	10 orang	

NO.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan			8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga	
8	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			3 orang	50 orang	60 orang	100 orang	3 orang		60 orang	100 orang	
9	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota				4 Layanan	5 Layanan	6 Layanan			5 Layanan	6 Layanan	
10	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
11	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindunga Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota				2 PD	2 PD	2 PD			2 PD	2 PD	
12	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota				40 Orang	50 Orang	60 Orang			50 Orang	60 Orang	
13	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik			50 Orang	10 Orang	20 Orang	30 Orang	50 Orang		20 Orang	30 Orang	
14	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang		70 Orang	70 Orang	
15	Jumlah laporan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan			3 Laporan	4 Laporan	
16	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	
17	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			110 Orang	125 Orang	150 Orang	200 Orang	110 Orang		150 Orang	200 Orang	
18	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	

NO.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	
20	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	
21	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi		30 Organisasi	30 Organisasi	
22	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	
23	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu			1 Dokumen	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	1 Dokumen		14 Kegiatan	14 Kegiatan	
24	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan			2 Dokumen	125 orang	120 orang	115 orang	2 Dokumen		120 orang	115 orang	
25	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				10 Orang	15 Orang	20 Orang			15 Orang	20 Orang	

NO.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang		80 Orang	80 Orang	
27	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	5 Dokumen	17 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen		17 Dokumen	5 Dokumen	
28	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	
29	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	
30	Jumlah berita acara hasil forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah					2 Berita Acara	2 Berita Acara			2 Berita Acara	2 Berita Acara	
31	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40 orang	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 orang		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	
32	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	
33	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	
34	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket		4 Paket	4 Paket	
35	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket		3 paket	3 paket	

NO.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket		2 paket	2 paket	
37	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket		5 Paket	5 Paket	
38	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket		4 paket	4 paket	
39	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	
40	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	
41	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan		3 laporan	3 laporan	
42	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan		11 laporan	11 laporan	
43	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit		13 Unit	13 Unit	
44	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit		2 unit	2 unit	
45	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit		33 unit	33 unit	
46	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-Isu Strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih di hadapi ke depan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikemukakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi intentitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang dihasilkan selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD) 2025-2029 sebagai berikut :

1) Masih terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hakanak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hokum (ABH);
2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*;
3) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran;
4) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak;
5) Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indicator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota;
6) Masih Adanya Kasus TPPO;
7) Adanya kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRTN dan Kekerasan Terhadap Perempuan;

8) Tingginya Potensi Tindak Perdagangan Orang;
9) Masih kurangnya partisipasi perempuan dilembaga legislatif;
10) Masih rendahnya peningkatan produktifitas ekonomi perempuan, Lansia, dan Perempuan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2025 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) berdasarkan usulan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2025, yang terdiri dari 7 program, 22 kegiatan dan 51 sub kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2025 dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Samarinda

No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Samarinda	**IKM**	90,5	**8,768,981,527**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Samarinda	**IKM**	90,5	**8,768,981,527**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	**Nilai AKIP**	**74**	**95,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Samarinda	**Nilai AKIP**	**74**	**95,000,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah	6 Dokumen	65,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah	6 Dokumen	65,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	5,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	5,000,000.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5,000,000.00	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5,000,000.00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5,000,000.00	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Samarinda	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5,000,000.00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Samarinda	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5,000,000.00	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5,000,000.00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5,000,000.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	5,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	5,000,000.00	

No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	**Jumlah Laporan**	**12 laporan**	**6,918,942,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Samarinda	**Jumlah Laporan**	**12 laporan**	**6,918,942,000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bulan	6,166,697,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bulan	6,166,697,000.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen	702,245,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen	702,245,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Laporan	50,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Laporan	50,000,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	**Jumlah pegawai**	**44 orang**	**204,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Samarinda	**Jumlah pegawai**	**44 orang**	**204,000,000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	104,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	104,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 Orang	50,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 Orang	50,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 Orang	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 Orang	50,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	**Jumlah laporan**	**4 laporan**	**295,616,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Samarinda	**Jumlah laporan**	**4 laporan**	**295,616,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	21,218,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	21,218,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	10,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	10,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	21,218,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	21,218,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	10,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2 Laporan	15,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2 Laporan	15,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	212,180,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	212,180,000	

No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	**Laporan rencana kebutuhan barang**	**1 laporan**	**910,423,527**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Samarinda	**Laporan rencana kebutuhan barang**	**1 laporan**	**910,423,527**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	500,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	500,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	350,423,527	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	350,423,527	
	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 unit	50,000,000	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 unit	50,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	10,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**2 laporan**	**160,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Samarinda	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**2 laporan**	**160,000,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 Laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 Laporan	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	150,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	150,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	**Jumlah Laporan Pemeliharaan**	**4 laporan**	**185,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Samarinda	**Jumlah Laporan Pemeliharaan**	**4 laporan**	**185,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah kendaraanperorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan bayar pajaknya	13 Unit	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah kendaraanperorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan bayar pajaknya	13 Unit	100,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayrkan pajak dan perizinannya	2 unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayrkan pajak dan perizinannya	2 unit	25,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit	10,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	

No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
2	**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	Samarinda	**Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan**	**68,69**	**1,030,024,163**	**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	Samarinda	**Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan**	**68,69**	**1,030,024,163**	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	**Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG**	3 Dokumen	**630,024,163**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Samarinda	**Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG**	3 Dokumen	**630,024,163**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	150,023,460	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	150,023,460	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Samarinda	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	200 Orang	275,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Samarinda	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	200 Orang	275,000,000	
	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Samarinda	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	235 orang	205,000,703	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Samarinda	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	235 orang	205,000,703	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	**Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja**	250 orang	**150,000,000**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Samarinda	**Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja**	250 orang	**150,000,000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Samarinda	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Organisasi	150,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum, Sosial dan Ekonomi	Samarinda	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Organisasi	150,000,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	**Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan**	**2 layanan**	**250,000,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Samarinda	**Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan**	**2 layanan**	**250,000,000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	4 Lembaga	125,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	4 Lembaga	125,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	125,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	125,000,000	

No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan				
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11
3	**Program Perlindungan Perempuan**	Samarinda	**persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**	**0,034%**	**675,499,000**	**Program Perlindungan Perempuan**	Samarinda	**persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**	**0,034%**	**675,499,000**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	**Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota**	**110 kasus**	**337,748,000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Samarinda	**Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota**	**110 kasus**	**337,748,000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	**168,874,000**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	**168,874,000**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat daerah	**168,874,000**	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat daerah	**168,874,000**
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	**Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan**	**2 lembaga**	**337,751,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Samarinda	**Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan**	**2 lembaga**	**337,751,000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 orang	168,874,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 orang	168,874,000
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuandalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	500 Orang	168,877,000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuandalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	500 Orang	168,877,000

No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan				
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11
4	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	Samarinda	**persentase perkawinan anak**	**1,85%**	**695,251,473**	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	Samarinda	**persentase perkawinan anak**	**1,85%**	**695,251,473**
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi**	8 Lembaga	**245,675,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah kabupaten/Kota**	Samarinda	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi**	8 Lembaga	**245,675,000**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 lembaga	100,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 lembaga	100,000,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	145,675,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	145,675,000
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	**Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak**	**300 keluarga**	**449,576,473**	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Samarinda	**Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak**	**300 keluarga**	**449,576,473**
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 layanan	449,576,473	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 layanan	449,576,473
5	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	Samarinda	**Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak**	**4 dokumen**	**318,270,000**	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	Samarinda	**Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak**	**4 dokumen**	**318,270,000**
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	**Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia**	**4 dokumen**	**318,270,000**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Samarinda	**Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia**	**4 dokumen**	**318,270,000**
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	**3 Dokumen**	**318,270,000**	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	**3 Dokumen**	**318,270,000**

No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
6	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	Samarinda	**Kota Layak Anak**	**800 s/d 900**	**1,166,990,000**	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	Samarinda	**Kota Layak Anak**	**800 s/d 900**	**1,166,990,000**	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Dokumen KLA	7 dokumen	**693,720,000**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Samarinda	Dokumen KLA	7 dokumen	**693,720,000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	40 organisasi	125,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	40 organisasi	125,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 dokumen	568,720,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 dokumen	568,720,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	**20 lembaga**	**473,270,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Samarinda	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	**20 lembaga**	**473,270,000**	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**150 Orang**	**95,000,000**	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**150 Orang**	**95,000,000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	**100,000,000**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	**100,000,000**	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	170,000,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	170,000,000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	108,270,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	108,270,000	

No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
7	**Program Perlindungan Khusus Anak**	Samarinda	**persentase kasus kekerasan terhadap anak**	**1,60%**	**254,360,000**	**Program Perlindungan Khusus Anak**	Samarinda	**persentase kasus kekerasan terhadap anak**	**1,60%**	**254,360,000**	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota	120 kasus	**84,786,000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Samarinda	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota	120 kasus	**84,786,000**	
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Samarinda	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	4 Kegiatan	84,786,000	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Samarinda	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	4 Kegiatan	84,786,000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Aktivis PATBM yang mendapat pelatihan	150 orang	**84,786,000**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Samarinda	Jumlah Aktivis PATBM yang mendapat pelatihan	150 orang	**84,786,000**	
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Samarinda	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	170 layanan	84,786,000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Samarinda	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	170 layanan	84,786,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 lembaga	84,788,000	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Samarinda	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 lembaga	84,788,000	
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Samarinda	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	220 orang	84,788,000	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Samarinda	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	220 orang	84,788,000	
	Program Perlindungan Perempuan (UPTD)	Samarinda	**persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**	**0,034%**	**375,000,000**	**Program Perlindungan Perempuan (UPTD)**	Samarinda	**persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**	**0,034%**	**375,000,000**	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan	70 orang	**315,000,000**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Samarinda	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan	70 orang	**315,000,000**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	200 orang	315,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	200 orang	315,000,000	

No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaPenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 lembaga	60,000,000			Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 lembaga	60,000,000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	60,000,000			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	60,000,000	
	Program Perlindungan Khusus Anak (UPTD)	Samarinda	**persentase kasus kekerasan terhadap anak**	**1.60%**	**170,000,000**	**Program Perlindungan Khusus Anak (UPTD)**	Samarinda	**persentase kasus kekerasan terhadap anak**	**1.60%**	**170,000,000**	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan	80 anak	**170,000,000**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Samarinda	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan	80 anak	**170,000,000**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	85 orang	170,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	85 orang	170,000,000	
					13,454,376,163					**13,454,376,163**	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda maka sejak tahun 2022 Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tupoksi menelaah usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang tingkat Kecamatan telah dipindahkan ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu sejak tahun 2022 tidak dilakukan telahaan usulan program dan kegiatan masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DP2PA

Untuk perencanaan Tahun 2025 Pemerintah Kota Samarinda mengikuti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program stategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan sub kegiatan yang selanjutnya disebut sub kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu kegiatan dan program. Rencana sub kegiatan dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar Tingkat Pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya Pembangunan Daerah. Disamping itu Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, tugas pokok dan fungsi kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi yang semakin baik terbukti dengan pencapaian IPG yang semakin baik dan meningkat setiap tahun. Berikut dapat dilihat pencapaian IPM , IPG dan IDG Kalimantan Timur dibawah ini :

Tabel 3.1

Diagram IPG Tahun 2015-2019

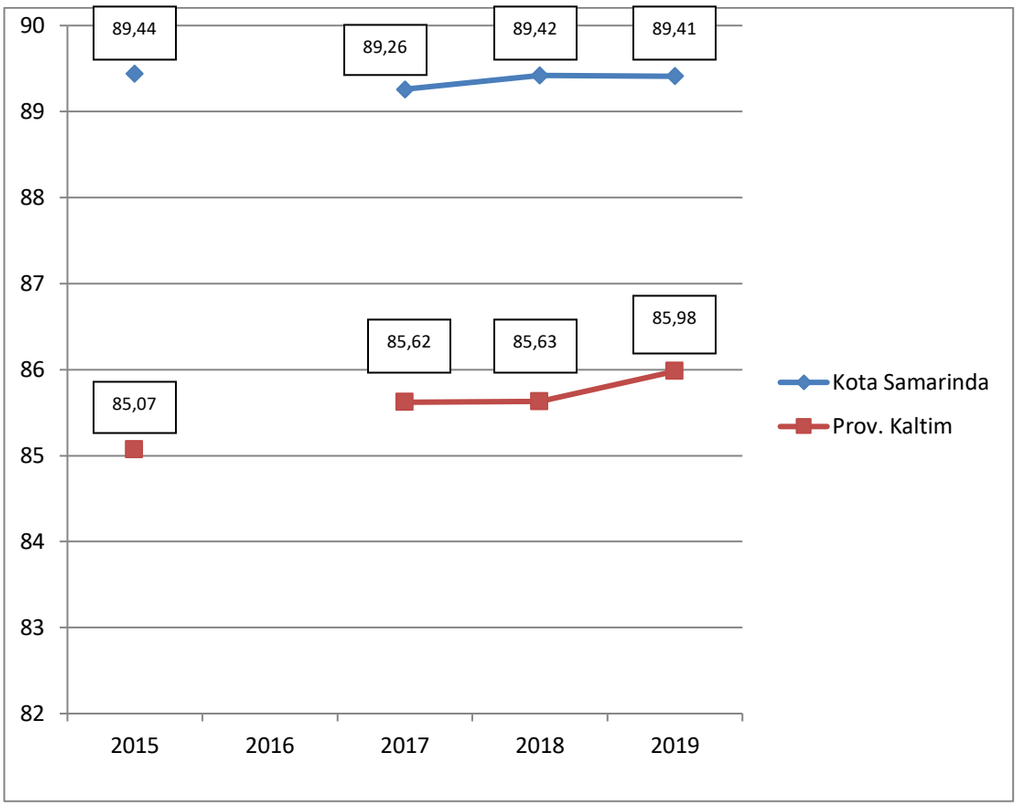

Dilihat capaian IPG Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa pembentuk dari IPG yang berupa angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita mendukung kenaikan dari nilai IPG tersebut. Namun demikian terjadi pluktuasi penurunan dan kenaikan pada tahun-tahun berikutnya dimana terjadi penurunan sebesar 0,18 dari 89,44 menjadi 89,26 pada tahun 2017, dan kenaikan sebesar 0,16 dari 89,26 menjadi 89,42 pada tahun 2018, dan penurunan sebesar 0,01 dari 89,42 menjadi 89,41 pada tahun 2019.

Tabel 3.2

Diagram IDG Tahun 2015-2019

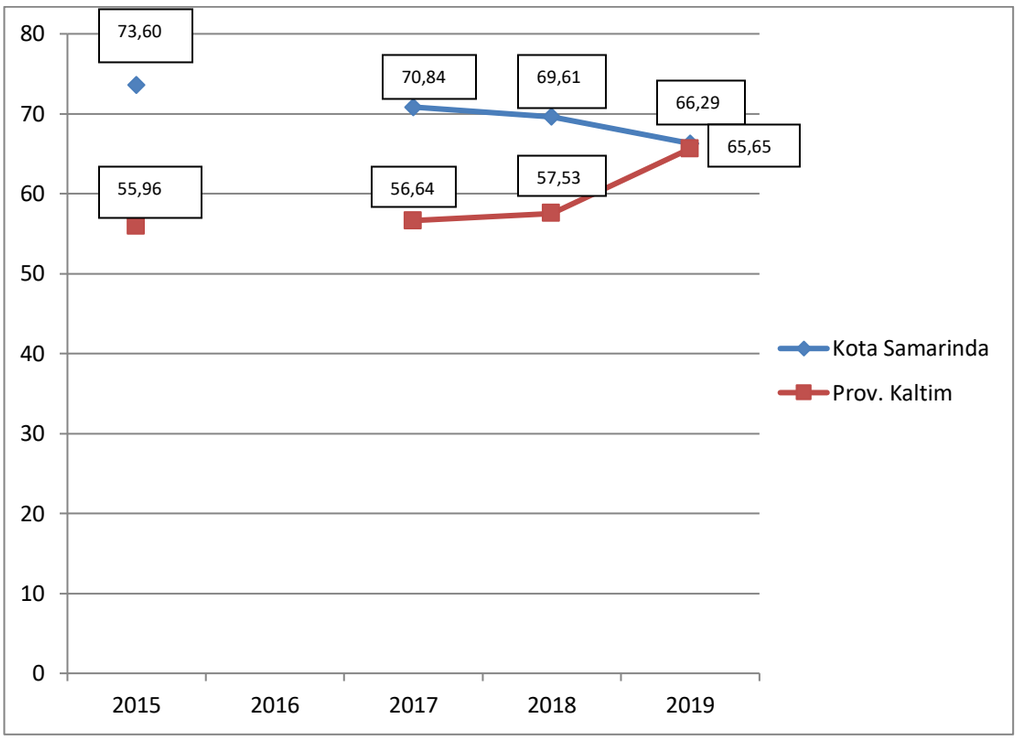

Capaian IDG Kota Samarinda cukup baik, pada tahun 2015 hingga 2019 sudah berada di atas IDG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Samarinda cukup tinggi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berbudaya

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda juga ditentukan dengan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menetapkan 1 (satu) sasaran yang akan dicapai, yaitu;

1. Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari seketariat dan 4 bidang pada rencana kinerja tahun 2025 terdiri 7 program, 22 kegiatan dan 51 Sub Kegiatan adalah :

PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Kab/kota

1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG

Kewenangan Kab/Kota.

3. Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota.

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan pencegahan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/kota

1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota
2. Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota

Kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota

1. Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota
2. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan

perempuan kewenangan kabupaten/kota

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kab/kota

1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kab/kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota

1. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengembangan KIE Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota
4. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota

1. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA.

Kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota

1. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan bahan logistik kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Fasilitasi kunjungan tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (UPTD PPA)

Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota

1. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota
2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

Berikut kami lampirkan tabel Dari Perubahan Rencana Kerja (renja) dan pendanaan Perangkat Daerah Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.3

PERUBAHAN RENCANA KERJA KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA							11.094.566.800,00	12.623.163.408,00	12.456.472.162,00	166.691.246,00							13.302.846.717,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.094.566.800,00	12.623.163.408,00	12.456.472.162,00	166.691.246,00							13.302.846.717,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							11.094.566.800,00	12.623.163.408,00	12.456.472.162,00	166.691.246,00							13.302.846.717,00	
1,	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				90,5 Nilai	77,00 92,00 Nilai Indeks	8.169.078.967,00	8.225.489.575,00	8.129.501.829,00	338.117.513,00							8.507.196.480,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				74 Nilai	17 Dokumen	300.000.000,00	280.093.000,00	231.263.500,00	-68.736.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai DP2PA Kota Samarinda		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	139.828.000,00	112.690.000,00	-37.310.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	47.815.000,00	41.723.500,00	-8.276.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.000.000,00
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.000.000,00
	2.08.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	42.450.000,00	26.850.000,00	-23.150.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.000.000,00
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				12 Laporan	12 Laporan	6.192.575.802,00	6.332.323.410,00	6.565.511.752,00	233.188.3425,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai DP2PA Kota Samarinda		6.918.942.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	5.741.943.069,00	5.842.374.746,00	6.188,319,752,00	270.062.194,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			6.166.697.000,00
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	400.632.733,00	439.948.664,00	327,192,000,00	112.756.664,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			702.245.000,00
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai				44 Orang	44 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai DP2PA Kota Samarinda		50.000.000,00
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	8 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				4 Laporan	4 Laporan	295.616.000,00	231.186.000,00	151.542.000,00	-144.074.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Sarana Prasarana DP2PA		293.254.480,00
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			6.000.000,00
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	31.218.000,00	15.609.000,00	15.609.000,00	-15.609.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.854.540,00
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	21.218.000,00	21.218.000,00	21.218.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.854.540,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.000.000,00
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	212.180.000,00	163.359.000,00	83.715.000,00	-128.465.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			218.545.400,00
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan rencana kebutuhan barang				1 Laporan	1 Laporan	581.887.165,00	581.887.165,00	369.687.577,00	-212.199.588,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Sarana Prasarana DP2PA		810.000.000,00
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			500.000.000,00
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	221.887.165,00	221.887.165,00	109.687.577,00	-112.199.588,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	3 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	314.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	1.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		160.000.000,00
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	164.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	1.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan				4 Laporan	4 Laporan	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan		185.000.000,00
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.000.000,00
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2,	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**				**68,69 Pers entase**	**10,50 49,71 % %**	**359.487.833,00**	**307.608.833,00**	**391.297.833,00**	**701.436.554,00**							**1.060.924.387,00**
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kew enangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG				3 Dokumen	3 Dokumen	209.487.833,00	182.919.833,00	131.058.833,00	-78.429.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Perangkat Daerah Kota Samarinda		640.924.387,00
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kew enangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kew enangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	109.487.833,00	97.239.833,00	64.466.833,00	-45.021.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.023.460,00
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kew enangan Kab/Kota																	
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				200 Orang	150 Orang	50.000.000,00	42.540.000,00	37.922.000,00	-12.078.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			275.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																	
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				235 Orang	150 Orang	50.000.000,00	43.140.000,00	28.670.000,00	-21.330.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			215.900.927,00
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja				250 orang	50 orang	50.000.000,00	42.607.000,00	36.857.000,00	-13.143.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Organisasi/Lembaga Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		150.000.000,00
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Organisasi	2 Organisasi	50.000.000,00	42.607.000,00	36.857.000,00	-13.143.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan				2 Layanan	2 Layanan	100.000.000,00	82.082.000,00	223.382.000,00	123.382.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		270.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				4 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	42.275.000,00	37.775.000,00	-12.225.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			135.000.000,00
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	150 Orang	50.000.000,00	39.807.000,00	185.607.000,00	135.607.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			135.000.000,00
3,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**				**0.034 Persen**	**84,21 %**	**1.051.500.000,00**	**1.069.461.000,00**	**987.137.000,00**	**-103.228.000,00**							**948.272.000,00**
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota				110 Kasus	80 Kasus	201.500.000,00	223.368.000,00	182.465.000,00	-19.035.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		274.136.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	3 Dokumen	151.500.000,00	177.226.000,00	160.381.000,00	8.881.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			137.068.000,00
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	50.000.000,00	46.142.000,00	22.084.000,00	-27.916.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			137.068.000,00
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan				2 Lembaga	2 Lembaga	300.000.000,00	297.843.000,00	275.022.000,00	-24.978.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Aktifis Masyarakat		339.136.000,00
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				150 Orang	90 Orang	50.000.000,00	48.781.000,00	33.206.000,00	-16.794.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			137.068.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				500 Orang	31 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	24.767.000,00	-233.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			137.068.000,00
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.062.000,00	17.049.000,00	-7.951.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00
4,	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar**				**1.85 persen**	**5,00 Layanan**	**200.000.000,00**	**189.840.000,00**	**184.545.500,00**	**619.545.250,00**							**819.545.250,00**
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan				8 Lembaga	2 Lembaga	100.000.000,00	89.840.000,00	84.545.500,00	-15.454.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga		245.675.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				5 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	42.072.000,00	37.277.500,00	-12.722.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	5 Orang	50.000.000,00	47.768.000,00	47.268.000,00	-2.732.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			145.675.000,00
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mew ujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mew ujudkan KG dan Hak Anak				300 Keluarga	5 Layanan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Lembaga Masyarakat		573.870.250,00
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mew ujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mew ujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Layanan	5 Layanan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			573.870.250,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5,	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan**				**4 Dokumen**	**42,00 %**	**50.000.000,00**	**47.546.000,00**	**46.453.000,00**	**277.818.100,00**							**327.818.100,00**
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia				4 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	47.546.000,00	46.453.000,00	-3.547.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	OPD, Lembaga swasta dan lain-lain		327.818.100,00
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	47.546.000,00	46.453.000,00	-3.547.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			327.818.100,00
6,	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**				**800 s/d 900 point**	**63,00 Indeks**	**320.000.000,00**	**306.354.000,00**	**268.512.000,00**	**881.999.700,00**							**1.201.999.700,00**
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen KLA				7 Dokumen	7 Dokumen	150.000.000,00	142.849.000,00	130.299.000,00	-19.701.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	OPD, LM, Dunia Usaha, Media Massa, Forum Anak Kota Samarinda, Anak menjadi korban kekerasan, anak usia 12-18 Tahun		656.363.500,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				40 Organisasi	40 Organisasi	50.000.000,00	47.835.000,00	38.385.000,00	-11.615.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			130.000.000,00
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	95.014.000,00	91.914.000,00	-8.086.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			526.363.500,00
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak				20 Lembaga	20 Lembaga	170.000.000,00	163.505.000,00	138.213.000,00	-31.787.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	OPD, LM, Dunia Usaha, Media Massa, Forum Anak Kota Samarinda, Anak menjadi korban kekerasan, anak usia 12-18 Tahun		545.636.200,00
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	50.000.000,00	47.835.000,00	38.121.000,00	-11.879.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	50.000.000,00	47.835.000,00	46.492.000,00	-3.508.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			200.000.000,00
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	50.000.000,00	47.835.000,00	35.100.000,00	-14.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			145.636.200,00
7,	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**				**1.60 Persen**	**81,16 88,24 Indeks %**	**944.500.000,00**	**2.476.864.000,00**	**2.449.025.000,00**	**-507.409.200,00**							**437.090.800,00**
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota				120 Kasus	120 Kasus	30.000.000,00	26.977.000,00	111.874.000,00	81.874.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat, Orang Tua, OPD, Stakeholder dan anak-anak usia dibawah 18 Tahun		85.696.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mew ujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																	
			Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				4 Kegiatan	4 Kegiatan	30.000.000,00	26.977.000,00	111.874.000,00	81.874.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			85.696.000,00
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan				2 Lembaga	2 Lembaga	99.020.000,00	105.357.000,00	105.177.000,00	6.157.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Lembaga layanan perlindungan anak		85.698.800,00
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																	
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				220 Orang	80 Orang	99.020.000,00	105.357.000,00	105.177.000,00	6.157.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			85.698.800,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK							**11.094.566.800,00**	**12.623.163.408,00**	**12.456.472.162,00**	**1.286.850.537,00**							**13.302.846.717,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.094.566.800,00**	**12.623.163.408,00**	**12.456.472.162,00**	**1.286.850.537,00**							**13.302.846.717,00**
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**11.094.566.800,00**	**12.623.163.408,00**	**12.456.472.162,00**	**1.286.850.537,00**							**13.302.846.717,00**
1,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**				**0.034 Persen**	**84,21 %**	**1.051.500.000,00**	**1.069.461.000,00**	**987.137.000,00**	**-103.228.000,00**							**948.272.000,00**
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan				70 Orang	70 Orang	550.000.000,00	548.250.000,00	529.650.000,00	-20.350.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat, Kelurahan, Kecamatan Kota Samarinda		335.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				200 Orang	70 Orang	550.000.000,00	548.250.000,00	529.650.000,00	-20.350.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			335.000.000,00
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan				2 Lembaga	2 Lembaga	300.000.000,00	297.843.000,00	275.022.000,00	-24.978.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Sarana Prasarana Lembaga		339.136.000,00
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			65.000.000,00
2,	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**				**1.60 Persen**	**81,16 88,24 Indeks %**	**944.500.000,00**	**2.476.864.000,00**	**2.449.025.000,00**	**-507.409.200,00**							**437.090.800,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan				80 Anak	150 Anak	815.480.000,00	2.344.530.000,00	2.231.974.000,00	1.416.494.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Anak korban kekerasan (0-18 Tahun)		265.696.000,00
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				85 Orang	150 Orang	550.000.000,00	505.488.000,00	392.932.000,00	-157.068.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			180.000.000,00
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																	
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				170 Layanan	7 Layanan	265.480.000,00	1.839.042.000,00	1.839.042.000,00	1.573.562.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			85.696.000,00
	J U M L A H								**11.094.566.800,00**	**12.623.163.408,00**	**12.456.472.162,00**	**166.691.246,00**							**13.302.846.717,00**

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari perubahan RPJMD Kota Samarinda dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, selama tahun 2025 telah tercermin dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2025 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Program kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama satu tahun anggaran serta merupakan implementasi tentang RENJA di tahun berikutnya.

Dengan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ini, telah dapat menggambarkan segala upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Namun masih dibutuhkan kerja keras dari semua pihak dengan melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan pada tahun mendatang, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya dengan terus menerus melakukan evaluasi, monitoring dan inovasi sehingga dapat tercipta kinerja yang lebih baik.